

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait yang menjadi masalah dalam evaluasi perizinan berusaha terintegrasi elektronik *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut, adapun kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti adalah layanan *Online Single Submission* (OSS) telah terlaksana, namun masih belum dilakukan secara maksimal yang dimana diukur dengan menggunakan teori oleh Mustopadidjaja dalam Nuryanti (2015: 223) dengan 5 (lima) dimensi, yaitu:

1. Kelompok Sasaran yang Ingin Dipengaruhi

Dalam dimensi kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi oleh perizinan bisnis terintegrasi melalui layanan *Online Single Submission* (OSS), dapat disimpulkan bahwa target utama layanan OSS adalah masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengurus perizinan dan harus mengurus perizinan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukannya. Oleh karena itu, evaluasi layanan OSS dari perspektif kelompok sasaran menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada komunitas bisnis atau pelaku usaha yang memerlukan pengajuan perizinan bisnis secara elektronik. Meskipun layanan OSS ini telah diimplementasikan dengan baik, karena

aspirasi dari masyarakat bisnis terhadap OSS sudah cukup banyak, namun masih terdapat kekurangan dalam efektivitas pelaksanaannya.

2. Berbagai Instrumen Kebijakan yang Digunakan

Dalam dimensi berbagai instrumen kebijakan yang digunakan, dapat dikonfirmasi bahwa implementasi layanan *Online Single Submission* (OSS) telah berhasil dilaksanakan. Dalam pelaksanaan layanan OSS, instrumen kebijakan yang terkait mencakup regulasi-regulasi, seperti *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan Surat Keputusan Kepala Dinas (SK Kadis) yang berkaitan dengan petunjuk-petunjuk terkait layanan *Online Single Submission* (OSS). Dalam implementasi OSS, hal ini termasuk dalam kerangka instrumen kebijakan yang komprehensif. Sebagai hasilnya, layanan *Online Single Submission* (OSS) diatur dalam kerangka instrumen kebijakan yang bersifat mengarahkan dan tidak memaksa, serta tidak bersifat represif. Tujuan dari layanan OSS adalah memberikan dukungan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan dalam mengurus perizinan usahanya, dengan harapan bahwa mereka mendapatkan izin melalui layanan OSS.

3. Responsi dari Lingkungan Kebijakan

Dalam dimensi responsi lingkungan kebijakan dalam pelaksanaan layanan *Online Single Submission* (OSS), dapat dikonfirmasi bahwa tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana telah dijalankan dengan baik. Pemerintah daerah, sebagai pelaksana dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait layanan *Online Single Submission*

(OSS), berkomitmen untuk menyampaikan kepada pihak terkait, seperti penyedia layanan atau pengembang, melalui surat resmi, sehingga perawatan dan tindak lanjut terhadap masalah yang dihadapi dapat dilakukan. Dengan demikian, ketika menyangkut upaya atau tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kelancaran pelayanan perizinan bisnis melalui OSS, ini memiliki dampak yang signifikan. Kebijakan-kebijakan terkait perizinan bisnis yang dirancang untuk memudahkan penyelenggaraan tugas-tugasnya tanpa hambatan akan memberikan kontribusi besar terhadap kualitas kinerja dan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, jika kebijakan-kebijakan tersebut dianggap tidak efektif atau lemah, kualitas kinerja dan dukungan masyarakat kemungkinan akan menurun.

4. Kinerja yang Dicapai

Pada dimensi kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan layanan *Online Single Submission* (OSS) dapat dianggap sudah mencapai tingkat kinerja yang baik. Layanan ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat, memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam mendapatkan layanan melalui *Online Single Submission* (OSS). Selama pelaksanaannya, terdapat kerjasama antar dinas yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mencakup pelayanan, proses perizinan, dan pengawasannya dalam mengimplementasikan kebijakan layanan OSS. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat kebutuhan untuk memperbaiki beberapa aspek, seperti proses pendaftaran atau mendapatkan layanan melalui situs yang

dimiliki oleh dinas terkait. Dalam hal ini, kemajuan pelaksanaan layanan *Online Single Submission* (OSS) masih relatif terbatas, dan beberapa masyarakat mungkin belum memahami sepenuhnya manfaatnya bahkan mungkin belum menyadari adanya layanan *Online Single Submission* (OSS) karena kurangnya sosialisasi yang belum mencapai tingkat yang memadai.

5. Dampak yang Terjadi

Dalam dimensi dampak yang terjadi, layanan *Online Single Submission* (OSS) telah memberikan dampak yang positif baik untuk pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum yang merasakan manfaat dari layanan tersebut. Dalam hal ini, tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan layanan *Online Single Submission* (OSS) melibatkan integrasi dan pengembangan terhadap layanan tersebut, serta memastikan sistem berjalan dengan baik. Dalam rencana pengembangan layanan *Online Single Submission* (OSS) ke depannya, perlu ditingkatkan pengawasan secara lebih baik, dengan koordinasi yang lebih baik antara dinas teknis dan pengaturan regulasi yang lebih efektif oleh pemerintah pusat. Selain itu, perlu meningkatkan fungsionalitas sistem agar dapat mengakomodasi lebih banyak permohonan perizinan. Pelatihan terhadap sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga yang kompeten dan ahli dalam mengelola sistem *Online Single Submission* (OSS) ke depannya.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilaksanakan, maka saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan evaluasi perizinan berusaha terintegrasi elektronik *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (Studi pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan) mencakup, sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menggali secara mendalam terkait berbagai sumber dan juga referensi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai layanan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
2. Bagi peneliti berikutnya, sebaiknya dapat melaksanakan penelitian dengan spesifik dan juga mendalam mengenai evaluasi dari perizinan berusaha terintegrasi elektronik *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (Studi pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan).
3. Hasil penelitian ini hanya terfokus pada evaluasi perizinan berusaha terintegrasi elektronik *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (Studi pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan).

Sehingga, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggali penelitian mengenai pelaksanaan dan monitoring dari perizinan berusaha terintegrasi elektronik *Online Single Submission* (OSS) di Kota Administrasi Jakarta Selatan secara keseluruhan.

5.2.2 Saran Praktis

1. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara dari layanan *Online Single Submission* (OSS) ini agar dapat memfokuskan *output* dari pelaksanaan layanan supaya dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien yang telah terintegrasi kepada layanan *Online Single Submission* (OSS).
2. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, disarankan agar dapat meningkatkan sosialisasi layanan *Online Single Submission* (OSS) kepada masyarakat. Serta berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait atau dengan para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mendukung pelaksanaan layanan *Online Single Submission* (OSS) agar lebih efektif.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan juga seluruh dinas-dinas terkait dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terintegrasi juga perlu melakukan evaluasi secara berlanjut kepada para pengguna terkait pelaksanaannya dan juga menghimbau masyarakat untuk dapat memberikan feedback atau umpan balik ketika telah menggunakan layanan *Online Single*

Submission (OSS) sebagai langkah pengawasan dan *monitoring* dari setiap pengguna. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan aspek *output* dari layanan *Online Single Submission* (OSS).

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

DKI Jakarta disarankan untuk meningkatkan sistem teknologi informasinya agar bisa menampung layanan perizinan dan non perizinan lebih banyak lagi kepada pelaku usaha. Sehingga, untuk kepastian waktu dalam proses perizinan dan non perizinan lebih efisien dan terjamin.

